

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas lembaga-lembaga publik semakin hari semakin menguat. Hal tersebut dilatar belakangi adanya fenomena penyajian laporan keuangan pemda yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya di lapangan. Pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 BPK menemukan 2.525 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian terhadap negara senilai Rp 1,13 Triliun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sebagai wujud penegakan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah, laporan keuangan wajib disusun dan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat dan para pihak lain yang membutuhkan. Seperti telah diketahui bersama, bahwa laporan keuangan pemda digunakan oleh pihak eksternal diluar eksekutif untuk penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan dimasa mendatang. Pengguna dari laporan keuangan pemda tersebut antara lain: masyarakat umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pihak-pihak lain yang berperan dalam kelangsungan pemerintahan pada suatu daerah.

Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu dan memenuhi prinsip-prinsip Standar Akuntansi. Prinsip akuntansi

yang digunakan oleh entitas sektor publik (Pemerintah Daerah) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Dalam SAP dijelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan pemda tersebut kemudian dipertanggungjawabkan di depan DPR/DPRD setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan dipublikasikannya laporan keuangan pemda, maka laporan keuangan yang disusun hendaknya memuat ciri kualitatif laporan keuangan. Ciri kualitatif laporan keuangan berarti standar-standar yang harus diwujudkan di dalam laporan keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. dalam laporan keuangan ciri kualitatif yang harus muncul adalah relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dengan mudah dapat dipahami.

Relevannya laporan keuangan adalah apabila isi dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dari pengguna laporan keuangan berdasarkan pertimbangan peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu, pada masa saat ini serta memprediksi peristiwa yang akan datang. Informasi yang relevan juga harus memiliki empat karakter informasi, yaitu adanya umpan balik, adanya manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.

Laporan keuangan yang baik apabila terbebas dari arti yang menyesatkan dan terbebas dari kesalahan yang material, fakta yang tersaji secara jujur, serta

dapat dipertanggungjawabkan (andal). Laporan keuangan juga harus memenuhi karakteristik dapat diperbandingkan dari tahun ke tahun atau dari satu periode ke periode berikutnya. Karakteristik yang terakhir ialah laporan keuangan harus dapat dengan mudah untuk dipahami. Artinya informasi yang disajikan bersifat informatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah tersebut, terdapat dua unsur nilai informasi yang penting, yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan. Keterandalan berarti informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut memang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan ketepatanwaktuan berarti informasi tersedia tepat pada saat informasi tersebut dibutuhkan. Informasi harus tersedia sebelum pengaruh informasi tersebut hilang dalam pengambilan keputusan. Dalam kasus tertentu menurut Suwardjono (2005) dalam Zuliarti (2012) menjelaskan bahwa untuk mengejar informasi yang tepat waktu kadang kala harus mengorbankan kualitas lain, seperti keakuratan dan keterandalan. Hal tersebut kadang menyebabkan tidak dapat selarasnya ketepatanwaktuan dengan keterandalan suatu informasi. Namun, bukan berarti tidak mungkin suatu ketepatanwaktuan dapat berjalan selaras dengan keterandalan. Dalam hal tersebut hanya perlu perlakuan khusus untuk mempercepat tersedianya data namun tidak mengurangi kualitas keterandalan dari informasi yang dihasilkan.

Kapasitas sumber daya manusia dapat dikatakan sebagai faktor nomor satu yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda. Pramudiarta (2015) menyatakan bahwa dengan adanya sumber daya

manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi nilai informasi akuntansi pada pelaporan keuangan. Terbatasnya sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi menjadikan kurang pahamiya pegawai dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Apabila kapasitas sumber daya manusia dalam suatu entitas kurang memadai, dapat mengakibatkan laporan keuangan yang kurang akurat dan penggunaan waktu menjadi tidak efisien. Maka dari itu peranan SDM dalam penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting.

Penggunaan teknologi informasi menjadi faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemda. Sebagaimana telah kita ketahui, setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (APBN/APBD) hampir dapat dipastikan selalu mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju harus dibarengi dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan serta memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk pelayanan terhadap publik. Salah satu contoh adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya pertanggungjawaban dan transparansi keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 1 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah telah mengatur mengenai kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Witono (2014) menyatakan teknologi informasi yang diterapkan pada pemerintah daerah mempengaruhi keterandalan laporan keuangan daerah tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan teknologi informasi yang digunakan pada pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta mampu menunjang pengelolaan keuangan pemda tersebut dengan baik.

Kendala yang mungkin terjadi dalam penerapan teknologi informasi berkaitan dengan kondisi ketersediaan *Hardware* maupun *Software* yang dipergunakan, tersedianya jaringan internet, terbatasnya sumber daya manusia yang mampu menggunakan teknologi informasi, dan terbatasnya anggaran pada pemerintah daerah. Kendala tersebut sangat mungkin terjadi pada entitas pemerintah seperti telah sering ditemukan keterbatasan-keterbatasan tersebut dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya ialah penerapan sistem pengendalian internal yang dapat memberikan pengaruh kepada andal atau tidaknya pelaporan keuangan pemda. Salah satu fungsi diterapkannya suatu pengendalian internal dalam suatu organisasi ialah memberikan keyakinan memadai terhadap suatu laporan keuangan yang disajikan. Selain itu juga mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin saja terjadi di dalam pengelolaan keuangan pemda. Hal tersebut wajar karena saat ini sering ditemukan pelanggaran oleh para pegawai di instansi pemerintahan yang tersangkut kasus korupsi. Untuk mencegah hal tersebut, pemda wajib untuk menerapkan pengendalian intern dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern yang diterapkan juga diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang andal.

Penjelasan tersebut sesuai dengan isi dalam Permendagri No. 13 Tahun 2016 yang berisikan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana di dalamnya menjelaskan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dibuat guna memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah yang diwujudkan dalam andalnya laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menjelaskan bahwa pengendalian intern memiliki peran yang penting terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Permatasari dan Witono (2014) menemukan bahwa sumber daya manusia, pengendalian internal, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Megayanti, Adiputra dan Sinarwati (2015) juga mengemukakan hal yang serupa bahwa kapasitas SDM, pengendalian internal akuntansi, dan penggunaan TI memberikan dampak yang signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemda. Demikian pula penelitian Astrawan, Wahyuni dan Herawati (2016) yang mengemukakan bahwa sistem informasi akuntansi, kapasitas sumber daya manusia, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tepat waktunya penyajian laporan keuangan pemda.

Beberapa temuan dalam penelitian tersebut ternyata berbeda dengan temuan dalam penelitian Komarasari (2016) dan Rosalin (2011) yang mengemukakan bila penggunaan teknologi informasi serta pengendalian internal memiliki pengaruh secara signifikan kepada keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian sebelumnya masih ditemukan hasil yang tidak konsisten sehingga menarik untuk melanjutkan penelitian pada topik yang sama. Selain itu, terbatasnya penelitian yang dilakukan pada sektor pemerintahan turut mendorong penulis untuk meneliti kembali tentang beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yang memiliki pengaruh kepada keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam penyajian laporan keuangan pemda. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian akan dilakukan pada OPD Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan, terdapat unsur nilai informatif yang penting, yaitu keterandalan dan ketepatanwaktuan. Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan baik apabila memenuhi kedua unsur tersebut (Zuliarti, 2012). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang

andal dan tepat waktu dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kapasitas SDM, pemanfaatan TI serta pengendalian internal akuntansi. Kapasitas SDM dapat dilihat dari latar belakang dan kemampuan seseorang dalam memberikan pengaruh terhadap andal atau tidaknya serta tepat waktu atau tidaknya suatu laporan keuangan. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, mau tidak mau di dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga harus menerapkan teknologi yang *up to date*. Penggunaan teknologi dapat mempercepat proses penyusunan laporan keuangan serta mengurangi adanya *human error* yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Disamping kedua faktor tersebut, penerapan pengendalian intern akuntansi juga dapat mempengaruhi andalnya suatu laporan keuangan. Hal tersebut karena maksud dari pengendalian intern sendiri adalah memberikan rasa yakin terhadap suatu laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah kapasitas SDM mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- b. Apakah pemanfaatan TI mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- c. Apakah pengendalian intern akuntansi mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah?
- d. Apakah kapasitas SDM mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah?

- e. Apakah pemanfaatan TI mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang serta perumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk membuktikan apakah kapasitas SDM mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Untuk membuktikan apakah pemanfaatan TI mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Untuk membuktikan apakah pengendalian intern akuntansi mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- d. Untuk membuktikan apakah kapasitas SDM mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- e. Untuk membuktikan apakah pemanfaatan TI mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

a. Bagi penulis

Dapat menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan penyajian laporan keuangan pemda.

b. Bagi Pemda Provinsi Jawa Tengah

Dapat digunakan sebagai bahan masukan terkait penerapan SDM, pemanfaatan TI serta pengendalian intern dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemda, sehingga dapat membantu mendapatkan hasil laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

c. Bagi Akademisi

Menambah literatur penelitian dalam bidang akuntansi sektor publik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan serta ketepatanwaktuan penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah.